



TRANSPARANSI INFORMASI DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA MASYARAKAT KOTA PALEMBANG

Indri

Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail : indree2003@gmail.com

Abstract (English)

Effective communication between the Regional People's Representative Council (DPRD) and the community is a key element to ensure transparency, accountability, and active participation in the government process. However, there are often various barriers that hinder this communication, which has the potential to create information gaps and reduce public trust in the legislature. This research aims to identify and understand the barriers that exist in communication between the DPRD and the community, as well as design solutions that can improve the effectiveness of communication. This study examines various obstacles that affect the delivery of information, including technical constraints, limitations of communication channels, and lack of transparency.

Article History

Submitted: 18 Desember2024

Accepted: 23 Desember2024

Published: 25 Desember2024

Key Words

Transparency, Information, Society

Abstrak (Indonesia)

Komunikasi yang efektif antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat merupakan elemen kunci untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Namun, sering kali terdapat berbagai hambatan yang menghalangi komunikasi ini, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami hambatan-hambatan yang ada dalam komunikasi antara DPRD dan masyarakat, serta merancang solusi yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Penelitian ini mengkaji berbagai kendala yang mempengaruhi penyampaian informasi, termasuk kendala teknis, keterbatasan saluran komunikasi, dan kurangnya transparansi.

Sejarah Artikel

Submitted: 18 Desember2024

Accepted: 23 Desember2024

Published: 25 Desember2024

Kata Kunci

Transparansi, Informasi, Masyarakat

Pendahuluan

Transparansi informasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat Kota Palembang adalah aspek penting dalam memastikan akuntabilitas dan keterlibatan publik dalam proses pemerintahan. Disektor publik, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Agar masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi tindakan serta kebijakan DPRD, informasi tentang kegiatan dan keputusan mereka harus tersedia secara terbuka. DPRD memiliki beberapa fungsi utama, termasuk legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk menjalankan fungsi-fungsi ini secara efektif, DPRD harus melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka. Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Kepercayaan merupakan elemen kunci dari transparansi, di mana informasi yang terbuka dan dapat diakses membantu membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

Komunikasi yang efektif antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat adalah kunci untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat hambatan yang menghalangi komunikasi ini, yang berpotensi menyebabkan kesenjangan informasi dan mengurangi



kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Transparansi informasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat Kota Palembang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pembuatan kebijakan sering kali terbatas. Tanpa informasi yang memadai, masyarakat mungkin merasa terasing dari proses tersebut. Transparansi informasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih aktif, memberikan masukan, dan berperan dalam proses pengambilan keputusan. Solusi yang efektif harus mempertimbangkan kendala teknis yang ada, meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami, serta mengatasi masalah bahasa dan literasi informasi untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat terlibat secara aktif dan efektif. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dengan masyarakat.

Masalah Penelitian

1. Apa saja tantangan dan hambatan dalam proses penyampaian informasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Masyarakat Kota Palembang ?
2. Apa dampak dari kurangnya transparansi informasi terhadap citra dan kredibilitas DPRD di mata Masyarakat ?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam proses penyampaian informasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Masyarakat Kota Palembang.
2. Mengetahui dampak dari kurangnya transparansi informasi terhadap citra dan kredibilitas DPRD di mata Masyarakat.

Kerangka Teori

Teori Konstruksi Sosial (*Social Construction Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa citra dibentuk melalui interaksi sosial dan interpretasi bersama. Artinya, citra tidak hanya merupakan hasil dari komunikasi internal, tetapi juga merupakan hasil dari bagaimana orang lain melihat dan mendiskusikannya. Dalam konteks organisasi, ini berarti citra dibentuk melalui interaksi dengan media, publik, dan stakeholder.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai transparansi informasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada masyarakat di Kota Palembang. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Desain Penelitian
 - Pendekatan Kualitatif: Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks, yaitu transparansi informasi DPRD Sumatera Selatan pada masyarakat Kota Palembang.
2. Lokasi dan Subjek Penelitian



- Lokasi: Penelitian dilakukan di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang terletak di Jl. Kapten A. Rivai No. 1, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
- Subjek Penelitian:
Subjek penelitian ini meliputi staf Humas DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Anggota DPRD, serta masyarakat yang terlibat atau terpengaruh oleh kegiatan Humas.

3. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara Mendalam: Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan Anggota DPRD Sumsel (untuk mendapatkan perspektif dari pihak penyedia informasi), Pejabat terkait di DPRD (misalnya, bagian komunikasi atau humas) Anggota masyarakat Kota Palembang (untuk mendapatkan perspektif dari penerima informasi).
- Observasi Partisipatif: Peneliti melakukan observasi langsung terhadap beberapa kegiatan DPRD Sumsel, seperti rapat terbuka, sesi informasi publik, dan acara sosial. Observasi ini dilakukan untuk mengamati langsung cara DPRD menyampaikan informasi dan interaksi dengan masyarakat.
- Analisis Dokumen: Dokumen-dokumen resmi, seperti laporan tahunan, publikasi, siaran pers, dan materi komunikasi resmi DPRD Sumsel. untuk menilai kualitas dan jenis informasi yang dipublikasikan serta sejauh mana informasi tersebut dapat diakses oleh Masyarakat.

4. Etika Penelitian

- Persetujuan Informasi: Peneliti meminta persetujuan dari semua partisipan untuk wawancara, dan observasi.
- Kerahasiaan: Data yang diperoleh dari partisipan dijaga kerahasiaan data pribadi dan identitas partisipan.
- Keterlibatan Partisipan: Partisipan memahami tujuan penelitian dan bagaimana data mereka akan digunakan

Hasil dan Pembahasan

A. Tantangan dan Hambatan dalam Proses Penyampaian Informasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Masyarakat Kota Palembang

Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi informasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Kurangnya aksesibilitas informasi



memperbesar kesenjangan komunikasi antara DPRD dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori transparansi informasi yang menyatakan bahwa ketidaktersediaan informasi yang mudah diakses dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berikut merupakan tantangan dan hambatan dalam proses penyampaian informasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Masyarakat :

1. Keterbatasan Aksesibilitas Informasi

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan aksesibilitas informasi yang disediakan oleh DPRD. Banyak informasi penting terkait kegiatan, keputusan, dan kebijakan DPRD tidak tersedia secara online atau tidak dipublikasikan secara konsisten. Hal ini membuat masyarakat kesulitan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memahami dan mengevaluasi tindakan DPRD.

2. Masalah Bahasa dan Literasi Informasi

Masalah bahasa dan literasi informasi juga menjadi hambatan signifikan. Informasi yang disediakan seringkali menggunakan bahasa teknis atau formal yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, tingkat literasi informasi di kalangan masyarakat bervariasi, sehingga tidak semua orang dapat memproses dan memahami informasi yang disajikan dengan baik.

3. Kurangnya Interaksi dan Komunikasi Dua Arah

Interaksi dan komunikasi dua arah antara DPRD dan masyarakat masih terbatas. Seringkali, informasi hanya disampaikan secara unidirectional tanpa adanya saluran yang memadai untuk umpan balik dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan.

2. Kendala Teknologi

Beberapa kendala teknis terkait teknologi juga berkontribusi pada masalah transparansi. Tidak semua masyarakat memiliki akses ke perangkat teknologi yang diperlukan untuk mengakses informasi secara online. Selain itu, situs web atau platform digital yang digunakan oleh DPRD mungkin tidak selalu user-friendly atau tidak terupdate secara berkala.

3. Minimnya Promosi dan Sosialisasi

Kurangnya promosi dan sosialisasi mengenai adanya informasi yang tersedia juga merupakan masalah. Masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa informasi penting



tentang kebijakan atau keputusan DPRD telah dipublikasikan, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk mengakses dan memanfaatkannya.

B. Dampak dari Kurangnya Transparansi Informasi terhadap Citra dan Kredibilitas DPRD di Mata Masyarakat

1. Penurunan Kepercayaan Publik

Kurangnya transparansi dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap DPRD. Jika masyarakat merasa tidak memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana keputusan diambil dan kebijakan dijalankan, mereka mungkin merasa bahwa DPRD tidak akuntabel dan tidak dapat dipercaya. Hal ini dapat mengurangi legitimasi dan otoritas DPRD di mata masyarakat.

2. Terjadinya Kesalahpahaman dan Spekulasi

adanya informasi yang jelas dan terbuka, masyarakat sering kali mengandalkan spekulasi dan rumor untuk memahami kebijakan dan keputusan DPRD. Ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan persepsi negatif yang tidak berdasar, yang pada akhirnya dapat merusak citra DPRD

3. Menurunnya Partisipasi Publik

Kurangnya transparansi dapat mengakibatkan menurunnya partisipasi publik dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Jika masyarakat merasa tidak terlibat atau tidak memiliki akses yang memadai untuk memberikan masukan, mereka mungkin enggan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemerintahan.

4. Risiko Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Tanpa adanya transparansi yang memadai, risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat meningkat. Informasi yang tidak transparan membuka peluang bagi praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal yang mungkin tidak terdeteksi atau tidak dapat dikritik oleh publik.

5. Pengurangan Legitimasi Institusi

Kredibilitas dan citra DPRD dapat terpengaruh secara negatif jika masyarakat merasa bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai. Ini dapat mengakibatkan pengurangan legitimasi institusi legislatif dan menghambat efektivitas fungsinya dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan.



Gambar 1. Unjuk rasa masyarakat di DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Dokumentasi pribadi (Agustus 2024)

Kesimpulan

Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi informasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Kurangnya aksesibilitas informasi memperbesar kesenjangan komunikasi antara DPRD dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori transparansi informasi yang menyatakan bahwa ketidaktersediaan informasi yang mudah diakses dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kendala teknis juga mempertegas pentingnya peningkatan infrastruktur komunikasi. Dalam konteks ini, penguatan saluran komunikasi berbasis digital, seperti website resmi yang user-friendly atau aplikasi mobile, dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi.

Selain itu, rendahnya tingkat keterlibatan DPRD dalam forum komunikasi publik menjadi indikator lemahnya implementasi prinsip partisipasi publik. Melibatkan masyarakat dalam diskusi langsung, misalnya melalui musyawarah, dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang diambil. Dengan meningkatkan transparansi dan aksesibilitas, DPRD tidak hanya mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat, tetapi juga menciptakan partisipasi yang lebih aktif dalam proses demokrasi lokal. Upaya ini juga relevan dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana transparansi menjadi elemen utama dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

Daftar Pustaka

- Arista, D. (2015). Transparansi informasi situs web pemerintah daerah di Sulawesi Selatan sebagai implementasi keterbukaan informasi publik. *Mahassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* <https://core.ac.uk/download/pdf/77622167.pdf>
- Febriananingsih, N. (2012). Public information disclosure in open government towards good governance. *Rechtsvinding*, 1(April), 135–156.



- Hikmat, M. (2018). Strategi Pemanfaatan Media Sosial Untuk Meningkatkan Citra Positif Dprd Dalam Persepsi Rakyat Daerah. *Jurnal Common*, 2(1). <https://doi.org/10.34010/common.v2i1.871>
- Huzaeni, M. R., & Anwar, W. R. (2021). Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(2), 213–230. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.754>
- Juwita, Soultan Joefried, M., Rusta, A., Irawati, & Fajri, M. (2023). Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya MencegahKecurangan dan Manipulasi. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.15(3), 445–453.
- Masud, M., & Haeril, H. (2022). PERAN HUMAS DPRD SEBAGAI SUATU SISTEM DAN FASILITATOR PUBLIK (Studi pada DPRD Kabupaten Bima). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 27–32. <https://doi.org/10.35326/jsip.v3i1.1904>
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika* , 3(3), 147–151.
- Ramadani, S. (2024). *Tantangan Media Relation Humas Dprd Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Meningkatkan Akses Keterbukaan Informasi Publik Pada Kalangan Mahasiswa Kota Makassar*. 5(3), 62–69.
- Sintia Kartini Haniandaresta, Diah Puspitasari, Dalila Afif, & Izzatusholekha Izzatusholekha. (2023). Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Jurnal Media Administrasi*, 8(1), 61–73. <https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.505>
- Supraja, G. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran melalui e-Government. *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT)*, 212–236. www.jpip.or.id